



Dari Redaksi

*Halus nian kala terusap
Pesona lembut tenunan satin
Setulus hati kami mengucap
Mohon maaf lahir dan batin*



Bulan Agustus – September kali ini penuh dengan warna. Ada berbagai momen yang terjadi di kantor perwakilan. Riuh gembira Idul fitri diwarnai dengan pengumuman mutasi. Ada suka, tawa, haru dan gundah, lebur menjadi satu mengiringi segala aktivitas yang hadir di keseharian kita.

Pada bulan Agustus, pengumuman mutasi menyeruak dan mengharuskan perpindahan lima karyawan terbaik di perwakilan. Kelima pegawai menyebar ke seantero Indonesia. Di penghujung ramadhan, pengumuman mutasi kembali hadir, menyebabkan beberapa pejabat utama tidak lagi bertugas di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.

Pengumuman ini tak pelak menghadirkan berbagai wacana, *Pertama*, kantor perwakilan kini perlahan menuju kearah perputaran kebijakan dan suasana yang baru. *Kedua*, kebijakan mutasi di lingkungan BPK RI bukan lagi semacam gertak sambal. Dan hal ini tentu saja, mau tak mau akan memaksa kita mempersiapkan diri. Namun apapun kondisinya, tentu saja semua berharap perubahan ini akan mendorong kinerja perwakilan ke arah yang lebih baik.

Sejalan dengan kondisi ini, redaksi mengangkat mutasi sebagai tema utama. Hal ini tampak pada laporan utama, rubrik *share* dan sumbangan pemikiran. Selain itu ada juga catatan diklat tentang *creative problem solving*, dan segmen audit BUMD.

Memanfaatkan momen idul fitri, redaksi kembali menelisis diri. Tentu saja dalam perjalanannya, kami tak luput dari segudang alpa. Mulai dari kurang menulis ucapan selamat, salah ketik, pilihan tema, sampai *keukeh* mengejar – ngejar narasumber (yang mungkin sedikit terganggu) Untuk itu, dengan takzim izinkan kami mengucapkan
"Taqobbalallahu Minna Wa Minkum, Shiyamana wa Shiyamakum.
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1431 H. Mohon Maaf Lahir dan Batin"

-redaksi-

Laporan utama

MUTASI, MOBILISASI TANPA HENTI

Sumber daya manusia merupakan salah satu pilar yang menentukan arah dan keberhasilan suatu organisasi.

Setiap organisasi mengimplemen-tasikan manajemen sumber daya manusia untuk menempatkan orang-orang yang tepat pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Salah satu mekanisme yang diterapkan dalam manajemen sumber daya manusia adalah mutasi pegawai. Pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan pegawai, karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam suatu organisasi. Bagi pegawai, mutasi bermanfaat untuk menunjang pengembangan pegawai, menghilangkan kejenuhan terhadap pekerjaan dan mengatasi perselisihan antara sesama pegawai. Bagi organisasi, mutasi berguna untuk menciptakan keseimbangan antara sumber daya manusia dengan komposisi pekerjaan atau jabatan, meningkatkan produktivitas kerja, serta memberikan pengakuan dan imbalan terhadap prestasi seseorang.

Sekalipun bermanfaat bagi pegawai dan organisasi, mutasi telah berkembang menjadi suatu permasalahan yang kompleks. Keengganan pegawai untuk dimutasi, terutama ke daerah yang jauh dari tempat tinggalnya, menjadi penghambat utama mutasi. Secara psikologis, keengganan tersebut wajar timbul karena setiap pegawai yang dimutasi memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan tempat yang baru. Stres dapat timbul akibat proses adaptasi yang tidak berjalan mulus. Keberadaan keluarga menjadi penambah kompleksitas permasalahan dalam mutasi.

Bagi pegawai BPK, mutasi adalah hal yang biasa. Untuk menjaga independensi pemeriksa BPK, perpindahan tugas pegawai dari satu unit kerja ke unit yang lain menjadi suatu keharusan. Mutasi pegawai menjadi salah satu isu kepegawaian di BPK saat ini.

Isu tersebut timbul karena :

1. jadwal mutasi tidak teratur;
2. dasar penentuan mutasi belum diketahui pegawai; dan
3. belum ada pemetaan kebutuhan kompetensi dengan pola rekrutmen.

Karena itu pada masa yang akan datang penempatan pegawai BPK diharapkan memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut.

1. mutasi dilaksanakan setelah 3 tahun;
2. mutasi pegawai didasarkan pada kompetensi minimal yang harus dimiliki untuk menjalankan tupoksi pada unit kerja tertentu;
3. penempatan dilakukan sesuai dengan peta kebutuhan dan rekrutmen dilakukan jika sumber daya yang ada tidak memadai.

Semua pegawai, khususnya pegawai negeri sipil, seyogyanya telah mempersiapkan dirinya untuk berpindah-pindah tempat penugasan sesuai dengan kebutuhan instansi. Walaupun setiap PNS telah menandatangani pernyataan kesiapan untuk ditempatkan di seluruh Indonesia, banyak hal yang akan menjadi pertimbangan saat mutasi diterapkan. Karena itu diperlukan strategi mutasi yang mengutamakan transparansi dan kompetensi sehingga setiap pegawai dapat memetik manfaat dari mutasi yang harus dilaluinya.

-13-

Redaksi

Pujo Sumekto, Eva Siregar, Elaine, Dwi Ari Susanty, Tridarwata, Maysyarah Nasution, Pipit Siti Jenar, M. Irsad Rizky

Alamat : Jl. Jend. Sudirman 721, Pekanbaru, Riau

Website : www.pekanbaru.bpk.go.id

Catatan Diklat

CREATIVE PROBLEM SOLVING Oleh : Meri Yanti

Creative Problem Solving atau pemecahan masalah secara kreatif merupakan pengembangan dari metode pemecahan masalah secara rasional, dimana dititikberatkan pada unsur-unsur kreativitas dan daya inovatif.

Hal ini bertujuan untuk membuka sudut pandang yang lebih luas terhadap kemungkinan-kemungkinan atas solusi yang tidak terduga sebelumnya atau permasalahan-permasalahan yang sulit didekati dengan analisis *step by step* secara linier yang biasa kita lakukan. Oleh karena itu, diperlukan 3 (tiga) konsep yaitu inovatif, kreatif, dan keberanian mengambil risiko.

Inovatif berkaitan dengan melakukan perubahan-perubahan, atau memperkenalkan hal-hal baru. Individu yang memiliki dorongan inovatif dengan sendirinya cenderung berfikir kreatif, karena inovasi tidak mungkin tanpa ide-ide kreatif. Menurut Albert Szent-Gyorgyi bahwa seseorang yang menemukan hal baru sebenarnya melihat hal yang sama dengan yang dilihat semua orang, perbedaannya hanya terletak pada apa yang difikirkan.

Berfikir secara kreatif sering diartikan sebagai kemampuan berfikir di luar kotak (*thinking outside the box*). Pada kondisi ini, seseorang berusaha untuk meninggalkan kelaziman, konvensi, kebiasaan atau hal-hal yang sudah umum untuk kemudian mencari sesuatu yang berbeda dan barangkali tidak terpikirkan sebelumnya. Menurut Graham Wallas (1926) gagasan kreatif tidak muncul mendadak atau tanpa persiapan, melainkan berkembang secara gradual melalui beberapa tahapan, yaitu.

1. Tahap persiapan,
2. Tahap inkubasi,

3. Tahap pemecahan, dan
4. Tahap verifikasi

Dalam berpikir kreatif, ada beberapa perilaku dan mental yang dapat menghambat atau mendorong kreativitas antara lain,

Hambatan Mental	Perilaku yang Mendorong Kreativitas
ini gagasan yang tidak logis!, mengikuti aturan, apakah gagasan itu praktis?, jangan kekanak-kanakan!, itu bukan bidang saya!, menghindari ambiguitas, jangan berbuat bodoh!, kekeliruan adalah kesalahan, dan saya bukan orang yang kreatif	Keingintahuan yang besar, sering mengajukan pertanyaan yang baik, memberikan banyak gagasan dan usul terhadap suatu masalah, bebas dalam menyatakan pendapat, memiliki rasa humor yang tinggi, dapat bekerja sendiri, menonjolkan satu bidang, dan kebutuhan untuk berprestasi serta kesanggupan mengambil risiko.

Keberanian mengambil risiko adalah salah satu komponen dari kemampuan pemecahan masalah secara kreatif. Risiko adalah ketidakpastian akan terjadi suatu peristiwa yang dapat menimbulkan terjadinya kerugian. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan manajemen risiko, yaitu proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas.

Problem solving pada dasarnya mengacu kepada upaya mencari pemecahan terhadap suatu masalah. Tidak semua masalah dalam kehidupan dan dalam organisasi dapat dipecahkan melalui prosedur pemecahan masalah secara baku. Pada persoalan-persoalan yang kompleks

atau tantangan permasalahan yang menuntut pendekatan yang kreatif dan inovatif, maka kita perlu menerapkan metode pemecahan masalah yang berbeda yaitu pemecahan masalah secara kreatif. Metode ini pada prinsipnya tidak berbeda dengan struktur penyelesaian masalah yang umumnya kita kenal. Tahapan yang paling sederhana dalam pemecahan masalah secara kreatif seperti yang diperkenalkan oleh W. Edward Deming (1986) dengan empat tahapan PDCA yaitu,

1. **Plan** (merencanakan pemecahan masalah),
2. **Do** (melakukan pemecahan langkah pertama),
3. **Check** (mengevaluasi hasil penerapan), dan
4. **Act** (mengambil tindak lanjut sebagai langkah perbaikan selanjutnya).

Jika dirinci akan menjadi 7 (tujuh) tahapan, yaitu **analisis situasi, pengumpulan data, analisis data, pencarian alternatif ide/solusi, penetapan solusi, penerimaan solusi, dan pembuatan rencana tindakan.** Pemecahan masalah secara kreatif merupakan bagian dari kompetensi khusus yang perlu dimiliki oleh organisasi dalam rangka menjembati antara teori dan praktek atau antara impian dan kenyataan, sehingga suatu visi misi dan perencanaan yang telah dibangun dapat terwujud menjadi kenyataan.



Share

SISTEM MUTASI PEGAWAI PADA PELAKSANA BPK RI

oleh: **Ester Arie Noerachmawati**

Sering kita mendengar kata mutasi dan bahkan bagi sebagian pegawai BPK, mutasi merupakan momok yang paling ditakuti, mengingat perwakilan yang ada sekarang tersebar di 33 provinsi. Siap tidak siap, cepat atau lambat, hal itu akan terjadi.

Mutasi atau rotasi pegawai sudah diatur oleh Biro SDM dengan mempertimbangkan segala hal. Pada dasarnya, tujuan mutasi adalah untuk mengembangkan potensi pegawai, mengurangi kejenuhan kerja, memberikan pengayaan pengalaman dan riwayat pekerjaan, meningkatkan wawasan pegawai, dan memberikan pemahaman nasionalisme PNS.

Dalam konsep sistem mutasi, pola yang digunakan berbeda-beda bagi setiap

objek dengan memperhatikan dasar perencanaan mutasi, seperti (1) keseimbangan antara kebutuhan organisasi dan pelaksanaan prinsip *the ability-job fit* dan *the personality-job fit* (kompetensi pegawai); (2) masa kerja pada suatu unit kerja terakhir; (3) komposisi pegawai pada suatu unit kerja berdasarkan *bezetting* pegawai; (4) pola dan jenjang karir seseorang dengan mempertimbangkan keluarga, jabatan, dan *job grade*; serta (5) tata laksana organisasi.

Pola mutasi untuk jabatan pemeriksa adalah sebagai berikut.

1. Perpindahan tenaga pemeriksa memperhatikan jenjang karir, formasi peran pemeriksa pada kantor perwakilan/kantor pusat.
2. Perpindahan tenaga pemeriksa harus melihat kebutuhan di setiap wilayah

pada kantor perwakilan BPK RI dan kantor pusat dengan ritme perpindahan untuk Wilayah Indonesia Timur minimal 3 tahun, Wilayah Indonesia Tengah minimal 4 tahun dan Wilayah Indonesia Barat minimal 6 tahun

3. Untuk menjaga independensi, perpindahan tenaga pemeriksa pada kantor Perwakilan BPK RI juga mempertimbangkan tipe perwakilan, yaitu Tipe A maksimum 6 tahun, Tipe B maksimum 4 tahun dan Tipe C maksimum 3 tahun

Pola mutasi untuk jabatan penunjang dan pendukung adalah sebagai berikut :

1. Menitikberatkan pada masa kerja pegawai di unit kerja, jenis pekerjaan, proses regenerasi peralihan pekerjaan, kompetensi, dan kemampuan pegawai dan rekomendasi atasan.

Sumbangan Pemikiran

MUTASI SEBAGAI SARANA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KARIER

Oleh : Imam Sutaya

Mutasi memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu sistem penyelenggaraan kepegawaian dalam sebuah organisasi. Minimal ada tiga manfaat/kepentingan yang dapat ditarik dari mutasi, yaitu kepentingan dinas, kepentingan pejabat yang bersangkutan dan kepentingan publik.

Mutasi perlu diadopsi menjadi suatu kebijakan dalam sistem penyelenggaraan kepegawaian dari suatu organisasi. Agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya strategi sebagai berikut:

1. Kebijakan mutasi perlu diformalkan dalam sebuah peraturan yang jelas;
2. Perlu adanya sosialisasi yang terus menerus mengenai kebijakan mutasi;
3. Seluruh pegawai harus *legowo* menerima kebijakan mutasi. Siapapun harus siap ditempatkan pada posisi/jabatan yang berbeda;
4. Para pimpinan harus rela

melepas anak buah terbaiknya untuk pindah dari lingkungan unit kerjanya ke unit kerja yang lainnya;

5. Semua pemangku kepentingan dalam organisasi maupun luar organisasi harus memiliki persepsi yang sama akan kebaikan konsep kebijakan mutasi;
6. Perlu adanya suatu standarisasi terkait dengan kebijakan mutasi;
7. Adanya penanganan khusus terhadap pegawai yang memiliki kompetensi dan berpotensi menjadi *key person* dalam suatu unit kerja.

Selain itu dalam menjalankan kebijakan mutasi pegawai perlu dipertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut.

1. Faktor biaya yang ditimbulkan dengan adanya kebijakan mutasi yang akan ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan,

misalnya biaya hidup PNS bersama keluarganya, biaya mobilisasi barang dan orang serta biaya pendidikan;

2. Apabila seorang pegawai sedang menempuh pendidikan di lokasi asal unit kerja sebaiknya dipertimbangkan tidak dimutasi pada saat itu sampai dengan pegawai tersebut selesai menempuh pendidikan;
3. Faktor psikologis dari pegawai yang bersangkutan dengan cara mengkonfirmasi kepada pegawai yang bersangkutan sebelum SK mutasi ditetapkan sehingga ada tenggang waktu bagi pegawai untuk melakukan persiapan.

Paparan di atas dirangkum dari makalah yang disampaikan pada program pembinaan sumber daya manusia di lingkungan sekretariat negara RI yang disampaikan oleh Sumarwoto, S.H., MPA (Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Dukungan Kebijakan) tanggal 31 Agustus 2006.



Share (lanjutan)

2. Dilakukan antara 4-5 tahun secara rutin dan terprogram.
3. Harus mempertimbangkan pola karir pegawai dan kompetensi yang dipersyaratkan.

Selama ini mutasi pegawai sudah dilakukan, namun SOP yang sudah dibuat belum disahkan dan masih diproses di Ditama Binbangkum. SOP Mutasi mengatur mengenai pelimpahan wewenang mutasi, syarat pegawai dapat dimutasikan, masa kerja mutasi berdasarkan wilayah, mutasi atas dasar permohonan pribadi, dan sanksi. Mutasi internal di kantor perwakilan umumnya mempertimbangkan kebutuhan unit kerja, masa kerja di unit kerja dan latar belakang pendidikan.

Beberapa hal yang perlu diketahui oleh pegawai terkait dengan mutasi adalah :

1. Mutasi pegawai non struktural dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi setahun dua kali, yaitu pada bulan Mei dan November (bulan bisa berubah). Mutasi yang berdasarkan permohonan pegawai diupayakan tetap dilakukan pada jadwal yang sama. Dasar permohonannya adalah

menyatukan pasangan suami istri, alasan sakit atau mendekati masa pensiun.

2. Seorang pegawai harus melaksanakan Surat Keputusan Sekjen tentang Perpindahan Tempat Tugas/Domisili paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan ditetapkan, kecuali alasan kedinasan paling lambat 3 (tiga) bulan dengan persetujuan dari Sekjen selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.



Tahukah Anda ???

Khasiat dari buah sirsak adalah memberikan efek anti tumor/kanker yang sangat kuat dan terbukti secara medis menyembuhkan segala jenis kanker. Selain dapat menyembuhkan kanker buah sirsak juga berfungsi sebagai anti bakteri, anti jamur (fungi) efektif melawan berbagai macam jenis parasit/cacing, menurunkan tekanan darah tinggi, depresi, stres dan menormalkan kembali sistem saraf yang kurang baik. Adapun kandungan dari buah sirsak adalah kaya vitamin c serta kaya serat.



Ket.: (1)Penyerahan LHP Provinsi,Pelalawan dan Rohul(29/06/10); (2)Penyerahan LHP Kota Pekanbaru(19/7/10); (3)Mou Kabupaten I; (4)Upacara HUT RI ke-(17/08/10); (5)Penyerahan LHP Kampar(16/08/10); (6)Penyerahan LHP Kuansing (06/09/10); (7)MOU Provinsi(I); (8)Sosialisasi Askes (04/08/10); (9)MOU Provinsi; (10)MOU Kab; (11)Satma PP(16/07/10); (12)Pemaparan Materi Diklat Legal Review(02/08/10); (13)Sosialisasi HIV dan Hepatitis oleh AURI (05/08/10); (14) Sosialisasi Penarikan Dana Satker (16/07/10); (15)Pisah Sambut Pegawai (30/08/10); (16)Buka Bersama Wartawan

KILAS PERWAKILAN

- Selasa (29/6), BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan LHP atas LKPD TA 2009 kepada tiga entitas, yaitu Pemerintah Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan pada sidang paripurna istimewa DPRD Provinsi Riau. LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan kepada masing-masing Ketua DPRD dan kepala Daerah. Untuk TA 2009 ini ketiga entitas meraih opini WDP.
- Tanggal 1 dan 12 Juli 2010 dilakukan pembahasan atas *draft* Kesepakatan Bersama (KB) BPK RI - DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota se - Provinsi Riau antara kedua belah pihak di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, mengadakan *Workshop* dengan tema "Penyusunan Perencanaan Penarikan Dana Harian Satker (Satuan Kerja) dan Perkiraan Pencairan Dana Harian Satker". Acara dilaksanakan kamis (15/7) dan Jumat (16/7) di ruang rapat Hotel Labersa dan kantor Perwakilan.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menerima kunjungan dari Satuan Mahasiswa

Pemuda Pancasila (SATMA PP), Jumat (16/7) di kantor Perwakilan. Rombongan diterima oleh Kepala Perwakilan didampingi oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Kasubaud Riau I, serta Kasubag Hukum dan Humas.

- Kepala Perwakilan menyerahkan LHP atas LKPD Kota Pekanbaru TA 2009 kepada Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Desmianto, dan Walikota Pekanbaru, Drs. H. Herman Abdullah, MM di kantor Perwakilan. Penyerahan diserahkan pada hari Senin, 19 Juli 2010. Untuk LKPD TA 2009 BPK RI memberikan opini wajar dengan pengecualian.
- Rabu (4/8), BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan sosialisasi dengan pembicara dari PT. Askes dan PT. Bank BNI. Acara dilaksanakan di auditorium Kantor Perwakilan dalam dua sesi terpisah. Selain mengikuti pemaparan, beberapa pegawai juga mengikuti *medical checkup* dan *papsmeur* gratis di Poliklinik Kantor Perwakilan.
- Kamis (5/8), BPK RI Perwakilan Provinsi Riau bekerjasama dengan Tim dokter AURI Pekanbaru mengadakan sosialisasi dengan tema "mengenal dan

mencegah penyakit hepatitis dan HIV - AIDS". Pemaparan dilaksanakan di auditorium dan diikuti oleh seluruh pegawai.

- Memperingati HUT RI ke - 65, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan serangkaian kegiatan mulai tanggal 3 s.d. 6 Agustus 2010. Kegiatan dimulai dengan pertandingan futsal, dilanjutkan dengan pertandingan tennis meja, tarik tambang dan *games*. Puncak acara dilaksanakan hari Jum'at (6/8) dan ditandai dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang, dimana Sub Aud Riau I tampil sebagai juara umum.
- Selasa, 17 Agustus 2010, Pimpinan dan Pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan upacara bendera memperingati HUT RI yang ke-65 di halaman Kantor Perwakilan, upacara ini dipimpin oleh Kepala Perwakilan.
- Kamis (19/8) BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan LHP atas LKPD Kabupaten Kampar TA 2009 kepada Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Syafrizal dan Bupati Kampar, Drs H Burhanuddin Husin, MM. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Perwaki-

KILAS PERWAKILAN (LANJUTAN)

lan di kantor Perwakilan. BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian untuk LKPD Kabupaten Kampar TA 2009

- Selasa (24/8) BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan *Media Workshop* dengan para insan pers di Provinsi Riau. Kegiatan dibuka oleh Kepala Perwakilan, dan menghadirkan Kasubaud Riau I, Kasubaud Riau II, Kasie Riau IB, dan Kasie Riau IIA sebagai pembicara. Materi yang dipaparkan terkait LHP atas LKPD Pemerintah Provinsi Riau, Kabupaten Pelalawan, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Rokan Hulu TA 2009. Termasuk didalamnya alasan pemberian opini dan Tindak Lanjut per 31 Desember 2009.
- Senin (6/9), Kepala Perwakilan Dr. H. Eko Sembodo, MM menyerahkan LHP atas LKPD Kabupaten Kuantan Singingi TA 2009 kepada Ketua DPRD Kabupaten Kuansing, Muslim, S.Sos dan Bupati Kuansing, H. Sukarnis di Kantor Perwakilan. Untuk TA 2009 Kabupaten Kuantan Singingi kembali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian.
- Selasa (7/9), BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Hasil

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) periode 31 Desember 2009 dan 30 Juni 2010, kepada delapan entitas di Provinsi Riau. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan kepada masing - masing Sekretaris DPRD, Sekretaris Daerah dan Inspektur Inspektorat di Auditorium Kantor Perwakilan. Delapan entitas tersebut adalah Provinsi Riau, Kabupaten Pelalawan, Siak, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Bengkalis, Rokan Hulu, dan Kota Dumai.

- Memperingati hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 2010, seluruh pimpinan dan pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengikuti upacara di halaman Kantor Perwakilan. Bertindak selaku Inspektur Upacara adalah, Kepala Sekretariat Perwakilan, Drs. Pujo Sumekto.
- Jumat, 1 Oktober 2010, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) per 30 Juni 2010 dan per 31 Desember 2009. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Drs. Pujo Sumekto kepada sejumlah Ketua DPRD, Kepala Daerah, Inspektorat dan Pimpinan BUMD. Hasil

Pemantauan yang diserahkan meliputi Kabupaten Kampar, Kuansing, Rokan Hilir, Siak, Bengkalis, RSUD Arifin Achmad, PT Bank Riau, PT PER, PT Riau Airlines, RSUD Kampar, BPR Sarimadu Kampar, RSUD Kota Dumai, PD Rohul Jaya, RSUD Rokan Hulu, PT Bumi Laksamana Jaya, PT Bumi Siak Pusako dan PT Sarana Pembangunan Siak.

- Senin, 4 Oktober 2010, Anggota VI BPK RI, Dr. H. Rizal Djalil didampingi pejabat dari BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengunjungi Riau Pos yang terletak di Jl. HR. Soebrantas.
- Selasa, 5 Oktober 2010, Anggota VI BPK RI, Dr. H. Rizal Djalil dan para Ketua DPRD di wilayah Provinsi Riau melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara BPK RI dengan DPRD se-Provinsi Riau tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Riau. Penandatanganan dilakukan di Auditorium Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Riau dan disaksikan oleh masing—masing Kepala Daerah.

Segmen Audit

PEMERIKSAAN BUMD Oleh : Indria Syzinia

Reformasi dan otonomi daerah mengakibatkan BUMD tumbuh bagai jamur di musim hujan. Segala macam bidang usaha “dirambah” oleh BUMD, tanpa memperhatikan apakah sumber daya manusia yang dimiliki kompeten atau tidak, tanpa mempertimbangkan apakah keberadaan BUMD tersebut memang mendukung program-program pemerintah dan apakah BUMD tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Hal tersebut sepertinya tidak terpikirkan lagi oleh penguasa daerah. BUMD dibentuk hanya karena “prestise” penguasa. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian BPK RI. Sesuai dengan undang-undang, BUMD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

Walaupun berwenang memeriksa BUMD, BPK RI menghadapi dilema terkait dengan ketentuan yang digunakan. BUMD dapat berbentuk perusahaan daerah (PD) atau perseroan terbatas (PT).

Apabila BUMD berbentuk PD, BPK RI akan mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan batasan kewenangan pemerintah daerah yang mengelola uang APBD pada BUMD itu. Pengelolaan BUMD yang berbentuk PD masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1962. Sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, pemerintah daerah bebas menentukan aturan sendiri dalam mengelola keuangan daerah. Ketentuan ini mengakibatkan seluruh kebijakan manajemen perusahaan daerah sepenuhnya dikendalikan oleh kepala daerah selaku pemilik perusahaan.

Apabila BUMD tersebut telah berbentuk PT, maka keputusan RUPS merupakan ketentuan yang paling mengikat dan berperan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan. RUPS dapat menetapkan pemeriksa pengelolaan keuangan BUMD tersebut sehingga dapat tidaknya BPK RI melakukan pemeriksaan akan bergantung pada hasil RUPS. BPK RI tidak dapat melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan BUMD apabila keputusan RUPS tidak menetapkan BPK RI sebagai pemeriksa laporan keuangan BUMD tersebut. Hal ini tidak berarti bahwa BPK RI tidak bisa lagi memeriksa BUMD. BPK RI tetap bisa melakukan pemeriksaan bila ditemukan indikasi adanya perilaku yang dapat merugikan keuangan daerah. BPK RI juga dapat melakukan pemeriksaan kinerja BUMD.

Undang-undang tentang BUMD seharusnya diterbitkan oleh pemerintah untuk menghindarkan bias pengelolaan BUMD. UU tentang BUMD telah ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2003 untuk menggantikan UU Nomor 9 Tahun 1969 namun UU tersebut tidak mengatur tentang BUMD. Sekalipun wacana pembahasan UU tentang BUMD telah dimulai sejak tahun 2006, namun Alhamdulillah hingga saat ini UU tersebut belum juga ditetapkan.

Hal ini perlu menjadi perhatian pimpinan BPK RI untuk melaksanakan wewenang seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa **BPK dapat memberikan pendapat** kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan **karena sifat pekerjaannya**.

Semoga hal ini dapat dilaksanakan oleh pimpinan, guna mendukung pekerjaan para auditor.

Semoga.....

UCAPAN SELAMAT

Redaksi mengucapkan selamat hari lahir kepada rekan – rekan :

- Yunaldi (5 Juli)
- Muhammad Ilyas (10 Juli)
- Sri Ulina Isabella Tarigan (13 Juli)
- Edy Soesatyo (19 Juli 1971)
- Muhammad Taufiq (7/20/1962)
- Nurul Huda (23 Juli)
- Arief Wibowo (5 Agustus)
- Kris Dianto (10 Agustus)
- Irawan Gunardi (12 Agustus)
- Lailiyama (22 Agustus)
- Wayan Bading (23 Agustus)
- Agus Setiawan (23 Agustus)
- Ni Komang Widyastuti (23 Agustus)
- Astomo Fitra Wibowo (24 Agustus)
- Ruspita Dewi (25 Agustus)
- Erfin Effendhi (30 Agustus)
- Muhammad Irsad Rizky (30 Agustus)
- Sormawati Damanik (4 September)
- Osa Namiko (8 September)
- Ade Riely Permana (8 September)
- Andi Nita Maulina (15 September)
- Delvi Olimpia (17 September)

- Zulaedah (20 September)
- Elaine Violche Acanthus (20 September)
- Sidratal Ahda (21 September)
- Zulfiana (22 September)
- Maysarah Nasution (24 September)
- Yudhistira Andhika S.B. (27 September)

Selamat menempuh hidup baru kepada :

- ♦ Doan Hotasi Tambun, SH, MH dengan Pinta Uli Br. Hutajulu, SE (21 Agustus 2010)
- ♦ Dani Indra, SE dengan Lailatul Fahrani, S. Pd (19 September 2010)
- ♦ Dwi Ari Susanty, SH dan Hanafianto (26 September 2010)

Selamat atas Kelahiran :

- **Muhammad Tariq Zaidul Haq** Putra pertama dari Richardo Marisi Hutabarat dengan dr. Dian Patricia Amri (17 Mei 2010)
- **Jubran Farras Hairisya** Putra pertama dari Helga Syanetta dan Suhairi (25 Juli 2010)
- **Reisy Arfan Ramdani** Putra pertama dari Dadan Fardani dan Rina Rachmawati (13 Agustus 2010)
- **Aga Fitra Musafar** Putra pertama dari

Zulaedah dan Santoso (15 September 2010)

- **Muhammad Rakha Dwi Putra**, Anak Kedua dari Novid Mahyudin dan Nike Astrid Setya Putri (20 September 2010)

- **Gabriella Margareth**, Putri Pertama dari Ruth Gok Maria Manalu dan Rudi Adri Pangaribuan (27 September 2010)

Segecap pimpinan dan pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengucapkan selamat berkarya dan semoga makin berjaya di tempat kerja yang baru

Kepada :

- ↳ **Ni Komang Widyastuti, S.H.** pindah ke **BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur**
- ↳ **Agus Setiawan, S.T.** pindah ke **BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah**
- ↳ **Ruly Azizati, S.E., Ak.** pindah ke **Auditorat Utama Keuangan Negara II**
- ↳ **Astomo Fitra Wibowo, S.E.** pindah ke **Pusat Pendidikan dan Pelatihan**
- ↳ **Firman Windratma, S.E., Ak.** pindah ke **BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur**

RESUME KLIPING



Tribun Pekanbaru, 1 September 2010

Pemko Anggarkan Rp 800 Juta

PEKANBARU, TRIBUN - Pemko Pekanbaru menganggarkan sebanyak Rp800 juta lebih untuk kegiatan inventarisasi asset yang belum terdata dalam laporan keuangan APBD tahun lalu. Kegiatan inventarisasi ini akan dilakukan oleh pihak ketiga.

Riau Mandiri, 27 Agustus 2010

Tindak Lanjuti Temuan BPK Gubri-Wagub Kembalikan Tunjangan Rp561 Juta

Gubernur Riau Rusli Zainal dan Wakil Gubernur Riau Raja Mambang Mit telah mengembalikan kenaikan tunjangan jabatan sebesar Rp561 juta sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Riau. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Riau, Hardy Jamaludin, ketika dikonfirmasi menyatakan, kenaikan tunjangan jabatan yang diterima gubernur dan wakil gubernur tersebut dikembalikan sebelum batas waktu selama 60 hari, sesuai rekomendasi yang dikeluarkan BPK Perwakilan Riau.

Tribun pekanbaru, 25 Juli 2010

Alamat Ormas Ternyata Bengkel

Hasil uji petik (sampel) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Riau terhadap organisasi masyarakat penerima bantuan sosial membuat buluh kuduk berdiri. Pasalnya dari sembilan ormas tersebut, tim BPK hanya menemukan satu alamat organisasi penerima yang sesuai dengan alamat surat permohonan bantuan. Sementara, delapan alamat organisasi lainnya tak bisa dilacak. Bahkan uniknyanya, tim BPK menemukan satu organisasi yang menggunakan alamat sebuah usaha bengkel, padahal dalam surat permohonan bantuan tertera sebagai alamat lembaga swadaya masyarakat (LSM).